

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya (Pendit, 2003:32). Secara tidak langsung berkembangnya industri pariwisata di suatu daerah diiringi juga dengan berkembangnya perekonomian masyarakat.

Berkembangnya pariwisata di suatu daerah membawa dampak positif terutama dalam bidang ekonomi misalnya pembangunan obyek wisata, meningkatnya investasi yang dilakukan oleh pihak swasta hingga perbaikan sarana dan prasarana daerah. Banyaknya dampak yang dinilai positif, ada juga dampak yang tidak diharapkan (dampak negatif), seperti semakin memburuknya kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat, memburuknya ketimpangan antar daerah, hilangnya kontrol masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi, dan sebagainya (Pitana, 2005 : 113). Disisi lain industri pariwisata juga membawa dampak negatif yaitu munculnya konflik dalam masyarakat lokal disekitar daerah wisata. Dampak ini muncul secara perlahan dan tidak langsung dirasakan oleh masyarakat.

Konflik yang terjadi sebagai akibat dari berkembangnya pariwisata di daerah tersebut.

Salah satu daerah yang sedang melakukan pembangunan dalam industri pariwisata adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi ini ditetapkan sebagai provinsi ke-31 oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil (babelprov.go.id diakses tanggal 04 Oktober 2016).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkenal akan keindahan pantainya. Kabupaten Belitung mempunyai daya tarik dalam bidang pariwisata, berdasarkan pada tujuan Pembangunan nasional yang dijabarkan melalui pendekatan konsep pembangunan daerah. Kabupaten Belitung dengan ibukota Tanjungpandan merupakan wilayah pengembangan sektor perdagangan dan jasa, pertanian, pariwisata, industri pengolahan dan perikanan laut (babelprov.go.id diakses tanggal 04 Oktober 2016). Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang akan dan sedang dikembangkan oleh pemerintah daerah Belitung.

Kabupaten Belitung mulai terkenal sejak penayangan film *Laskar Pelangi* yang memperlihatkan keindahan dan keunikan pantainya. Tentunya hal ini langsung dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam membangun dan

mengembangkan pariwisata di Kabupaten Belitung. Banyaknya jumlah wisatawan mendorong pemerintah daerah dalam memperbaiki sarana dan prasarana yang ada seperti jalan umum, transportasi hingga penunjuk arah atau jalan bagi pengunjung. Jumlah investasi yang masuk ke Belitung juga meningkat dapat dilihat dengan adanya pembangunan hotel-hotel berbintang, pembukaan lahan-lahan baru sebagai obyek wisata hingga perluasan lokasi wisata.

Diantaranya destinasi yang terkenal dan sering dikunjungi oleh wisatawan adalah Pantai Tanjung Tinggi, pantai ini merupakan lokasi syuting film *Laskar Pelangi*. Pantai Tanjung Tinggi terletak di Desa Tanjung Tinggi, dan menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik perhatian masyarakat lokal dan wisatawan. Tentu jumlah wisatawan yang datang tergolong tinggi karena pantai ini memiliki keindahan alam yang menarik yaitu banyaknya batu granit dengan berbagai ukuran di sekitar pantai, pasir yang putih dan air laut yang sangat jernih. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Belitung terus meningkat diketahui pada bulan Juli (2016) jumlah wisatawan asing dan lokal yang datang sebanyak 12.677 orang dan bulan Agustus (2016) sebanyak 13.221 orang. Peningkatan jumlah wisatawan dari bulan Juli hingga Agustus terhitung sebanyak 544 orang (belitungkab.bps.go.id diakses tanggal 12 Oktober 2016).

Banyak jumlah wisatawan yang datang menjadi dorongan bagi *stakeholder* yaitu PT. Ranati sebagai pemilik dan pengelola lahan serta

pemerintah daerah untuk mengembangkan pantai Tanjung Tinggi. Rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemilik lahan adalah membangun kawasan pantai menjadi Hotel dan Lapangan Golf beserta fasilitas lainnya yang diperuntukan bagi wisatawan. Namun dalam usaha untuk mengembangkan kawasan wisata terjadi benturan kepentingan antara pemilik lahan dengan pedagang yang sudah menetap disekitar pantai.

Pertama terjadi konflik antara pedagang yang sudah lama menetap berjualan di Pantai Tanjung Tinggi dengan pemilik lahan, pedagang bersikeras untuk terus berjualan walaupun sudah diperingati untuk segera pindah. Perseteruan ini terjadi dalam waktu yang cukup lama, namun pada akhirnya solusi dari konflik ini yaitu para pedagang siap direlokasi ke atas bukit dan tidak akan mengganggu area pantai, pemilik lahan PT. Ranati juga menghibahkan tanah seluas 3,5 hektar kepada pemerintah daerah untuk dibangun akses jalan menuju lokasi tersebut (POS BELITUNG, 2016 diakses tanggal 26 September 2016).

Pasca relokasi dan dilakukan pembebasan lahan, untuk beberapa bulan area pantai masih bebas dari para pedagang, tetapi tidak membutuhkan waktu yang lama pedagang liar kembali bermunculan disekitar pantai. Adanya tempat bilas bagi pengunjung, warung makan hingga pedagang kaki lima masuk dan kembali berjualan. Jumlah pedagang liar yang kembali berjualan di sekitar Pantai Tanjung Tinggi semakin lama semakin banyak terutama pada hari libur. Perilaku pedagang yang membandel dan berulang kali kembali berjualan

disekitar pantai dapat menimbulkan konflik baru antara pedagang dengan pemilik lahan juga dengan pemerintah daerah.

Sikap pedagang yang bersikeras dan tetap terus berjualan menghambat pemilik lahan untuk melakukan pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya. Untuk menghindari terjadinya konflik baru Satpol PP mewakili pemerintah daerah melakukan penertiban di kawasan pantai. Tetapi setelah dilakukan penertiban sekalipun para pedagang liar kembali berjualan dan tidak memperdulikan larangan yang sudah diberikan.

Sikap pedagang yang bersikukuh untuk tetap berjualan di area pantai membuat pemerintah daerah mengambil tindakan tegas dengan melakukan razia atau penertiban di Pantai Tanjung Tinggi secara rutin. Pemerintah daerah Kabupaten Belitung menginginkan pembangunan cepat dilaksanakan sehingga permasalahan seperti ini tidak terjadi berulang kali, tapi permintaan dari pemerintah daerah tidak begitu ditanggapi oleh PT.Ranati. Sikap yang ditunjukkan oleh PT.Ranati seakan-akan tidak begitu memperdulikan pembangunan di area pantai. Hal ini dapat dilihat karena sampai saat ini belum ada kejelasan secara pasti rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh PT.Ranati di Pantai Tanjung Tinggi. Pemerintah daerah juga tidak mengetahui rencana pembangunan tersebut secara pasti, karena baik pemerintah dan PT.Ranati tidak ada koordinasi dengan baik atau kerjasama antara kedua belah pihak.

Sikap yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak tidak dipungkiri akan memunculkan suatu konflik baru yang akan lebih rumit dibandingkan dengan konflik sebelumnya, karena tidak hanya akan melibatkan dua pihak tapi lebih dari itu. Konflik yang terjadi antara pedagang liar dengan pemilik lahan, ini termasuk kedalam konflik yang tertutup karena hanya pihak-pihak yang berkaitan saja merasakan dampak dari konflik tersebut. Sikap pedagang liar yang terus berjualan di sekitar pantai Tanjung Tinggi, tidak dipungkiri dapat memunculkan potensi konflik yang lebih besar dan rumit lagi. Pemerintah daerah selaku pihak yang berkewajiban dalam mengawasi dan mengontrol pembangunan daerah seharusnya dapat mengambil tindakan tegas dalam mengatasi permasalahan ini.

Diharapkan setiap pihak yang terlibat dalam konflik ini dapat segera menemukan solusi yang baik bagi seluruh pihak dan tidak merugikan pihak tertentu. Apabila konflik ini tidak segera ditangani dengan benar maka pembangunan dalam bidang pariwisata di Kabupaten Belitung juga akan terhambat, selain itu nantinya akan muncul aktor-aktor baru yang mencari keuntungan dari konflik yang terjadi.

Berbagai polemik terjadi dalam mengembangkan Pantai Tanjung Tinggi menjadi kawasan wisata yang lebih maju, adanya pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang ingin dicapai membuat pembangunan di Pantai Tanjung Tinggi terhambat. Oleh karena itu, yang akan menjadi fokus peneliti adalah mendeskripsikan dan menganalisis dinamika konflik yang terjadi dalam pengembangan kawasan wisata di Pantai Tanjung Tinggi. Adapun judul

penelitian ini adalah Dinamika Konflik dalam Pengembangan Pantai Tanjung Tinggi Sebagai Daya Tarik Wisata Kabupaten Belitung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah Bagaimana dinamika konflik yang terjadi dalam pengembangan Pantai Tanjung Tinggi sebagai daya tarik wisata Kabupaten Belitung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis dinamika konflik yang terjadi dalam pengembangan Pantai Tanjung Tinggi sebagai daya tarik wisata Kabupaten Belitung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan terkait dinamika konflik yang terjadi dalam pengembangan Pantai Tanjung Tinggi sebagai daya tarik wisata Kabupaten Belitung. Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dalam perkembangan

ilmu Sosiologi pada umumnya dan dalam bidang Sosiologi Pariwisata pada khususnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Belitung dan *stakeholder* yang terkait dalam pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Belitung. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang dinamika konflik dalam pengembangan kawasan wisata yang terjadi di Kabupaten Belitung.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah penyajian hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bertujuan untuk menghindari terjadinya plagiasi penelitian dan mendukung keabsahan penelitian. Pada penelitian ini, penulis sudah melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan dinamika konflik.

Penelitian pertama dilakukan oleh Lusiana (2011) yang berjudul *Dinamika Konflik Pertimahan Bangka Belitung (Demonstrasi Tahun 2006 tentang Masalah Pertimahan)*. Penelitian menggambarkan konflik pertambangan timah tahun 2006 terjadi karena persaingan bisnis antara PT.Timah dengan smelter-smelter yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap UU No.11 tahun 1967 dan tidak memiliki kuasa penambangan yang

jelas. Konflik pertambangan timah Bangka Belitung tahun 2006 lalu terjadi karena persaingan bisnis PT. Timah Tbk dengan smelter-smelter. Isu penutupan smelter dan penertiban besar-besaran terhadap tambang rakyat menimbulkan keresahan - keresahan masyarakat penambang.

Konflik pertambangan Bangka Belitung tahun 2006 lalu membawa dampak di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Di bidang sosial, yaitu munculnya pergerakan sosial yang dilakukan atas dasar keprihatinan dan kepedulian terhadap korban kekerasan dalam aksi demonstrasi. Berdampak pada solidaritas kelompok yang semakin kuat karena mempunyai kepentingan yang sama, tidak hanya sebatas sesama penambang tapi juga ikatan solidaritas yang terbangun karena mencegah tindakan anarkis dalam demonstrasi tersebut.

Selanjutnya di bidang ekonomi, pasca konflik harga timah mengalami penurunan sehingga terjadi kelesuan perekonomian. Namun keterpurukan ini tidak berlangsung lama, sekitar satu tahun pasca konflik smelter mulai beroperasi kembali, terjadinya peningkatan yang tinggi terhadap perekonomian di Bangka Belitung. Perekonomian yang meningkat bisa dilihat dari daya beli masyarakat yang meningkat, muncul pusat-pusat perbelanjaan atau ruko-ruko yang bergerak di sektor perdagangan, terbuka lapangan pekerjaan, dan perputaran uang yang meningkat. Di bidang politik, konflik berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Gubernur yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, sehingga berdampak pada situasi politik saat Pilkada. Pasca konflik UU No.11 tahun 1967 dikaji kembali

oleh pemerintah pusat dan dirancang kebijakan baru yaitu UU No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Penelitian kedua dilakukan oleh Rupain (2012) yang berjudul *Dinamika Konflik Masyarakat Dan Dampaknya Pada Wacana Desa Peradong Sebagai Desa Mandiri*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktor-aktor tertentu yang memiliki kekuasaan bisa mempengaruhi individu atau kelompok-kelompok yang pro dan kontra. Ini disebabkan adanya perbedaan persepsi dan kecemburuan sosial. Wacana desa Peradong sebagai desa mandiri tidak mendapat dukungan secara maksimal oleh masyarakat, karena kurangnya kerjasama aparatur desa dan beberapa perangkat desa lainnya.

Dinamika konflik masyarakat terkait dengan program-program pemerintah yang sifatnya tersembunyi dan bergerak secara dinamis, ini terungkap dengan adanya wacana Desa Peradong sebagai desa mandiri. Program pembangunan di Desa Peradong mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial antara Dusun Peradong dan Dusun Menggarau, pembangunan yang terjadi tidak dilakukan secara merata sehingga masyarakat berprasangka buruk terhadap orang yang memiliki wewenang di desa. Wacana desa mandiri tersebut menimbulkan blok-blok dalam masyarakat, yaitu dinamika pro dan kontra.

Dinamika pro dalam hal berbentuk kesejahteraan yang ingin dicapai oleh masyarakat yang mendukung desa mandiri agar desanya mengalami perkembangan dari ketertinggalan ekonomi yang dialami saat ini, ingin

mewujudkan pengembangan ekonomi desa dalam sektor perkebunan dan kelautan untuk terciptanya kemandirian desa yang berwawasan lingkungan mufakat dan mandiri. Pada dinamika kontra terjadi dengan sikap masyarakat yang berprasangka atau kecurigaan yang menjadi penghambat karena kurangnya kerjasama untuk membangun desanya, ada anggapan bahwa wacana desa tidak transparan dalam pelaporan kas desa dan juga struktur aparatur desa belum terlaksana dengan baik.

Penelitian ini menggunakan teori Coser tentang Perspektif Konflik Realistis. Konflik realistis berkembang karena prasangka masyarakat terhadap kepala desa yang tidak transparan, adanya kepentingan sendiri, struktur aparatur desa belum siap. Dan juga konflik non realistis, berupa kecemburuan masyarakat yang tidak bisa dihilangkan menyebabkan rasa dendam yang bisa menjatuhkan kepala desa dalam bentuk apapun. Konflik antar kelompok yang terjadi di desa Peradong dimana setiap adanya program pembangunan mereka saling bertentangan untuk tempat pembangunan tersebut. Perbedaan persepsi masyarakat terhadap wacana desa mandiri yang berhadapan dengan kepala desa yang sulit untuk menempatkan pembangunan secara adil antara Dusun Peradong dan Dusun Menggarau sehingga terjadi persepsi yang bias.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Silvi Efiliana (2014) dalam penelitiannya berjudul *Konflik Pendirian Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Di Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah Dalam Perspektif Ralf Dahrendorf* menjelaskan tentang konflik antara masyarakat Desa Air Mesu Timur dengan pihak perusahaan. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan konflik yang terjadi antara masyarakat desa Air Mesu Timur dengan pihak perusahaan yaitu Kepentingan bisnis yang tidak tersalurkan dari pihak masyarakat desa bermula ingin menawarkan jasa PLN atau proyek PLN kepada pihak SPPBE. Namun, penawaran jasa ini tidak diterima oleh pihak SPPBE. Pihak perusahaan telah bekerja sama dengan pihak proyek PLN yang lain. Hal ini dapat menjadi pelantaran konflik pertentangan antara masyarakat desa dengan pihak perusahaan SPPBE.

Konflik yang terjadi akan mengganggu kenyamanan masyarakat, masyarakat khawatir dampak pada kondisi fisik lingkungan seperti pencemaran air yang disebabkan kontaminasi dengan limbah hasil sisa kegiatan perusahaan, polusi udara, hingga kerusakan jalan akibat kegiatan perusahaan SPPBE. Dalam penelitian ini Silvi menggunakan teori Ralf Dahrendorf, kategori konflik yang berhubungan dengan fenomena konflik di kecamatan Pangkalan Baru adalah konflik kepentingan laten dan manifes.

Konflik kepentingan laten merupakan tingkah laku potensil yang telah ditentukan seseorang karena menduduki peranan tertentu tapi belum disadari, sedangkan konflik kepentingan manifes merupakan kepentingan yang disadari semua pihak untuk dicapai sebagai tujuan. Dengan pendirian SPPBE tersebut akan mengganggu kenyamanan masyarakat. Masyarakat tidak sadar mereka dikuasai oleh pihak yang berkuasa sehingga masyarakat selalu dianggap rendah. Pihak SPPBE merasa mereka mempunyai kekuasaan dan masyarakat desa Air Mesu Timur disampingkan oleh pihak perusahaan tersebut.

Berdasarkan ketiga penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Pada ketiga penelitian sebelumnya letak persamaannya adalah sama-sama memfokuskan tentang konflik. Sedangkan perbedaannya adalah pertama penelitian Lusiana (2011) yang berjudul “ Dinamika Konflik Pertimahan Bangka Belitung (Demonstrasi Tahun 2006 tentang Masalah Pertimahan) mengkaji tentang konflik pertambangan timah tahun 2006 terjadi karena persaingan bisnis antara PT.Timah dengan smelter-smelter yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap UU No.11 tahun 1967, penelitian ini menggunakan Teori Konflik Fungsionalisme Lewis Coser dan Teori Kekerasan Struktural Johan Galtung.

Kedua, penelitian Rupain (2012) yang berjudul “ Dinamika Konflik Masyarakat dan Dampaknya Pada Wacana Desa Peradong Sebagai Desa Mandiri “ mengkaji tentang konflik yang terjadi antara kelompok pro atau kontra terkait dengan wacana desa Peradong sebagai desa mandiri, penelitian ini menggunakan Teori Coser tentang Persepektif Konflik Realistis. Dan ketiga penelitian Silvi (2014) yang berjudul “Konflik Pendirian Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) Di Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah Dalam Persepektif Ralf Dahrendorf “ mengkaji tentang konflik yang terjadi antara masyarakat desa Air Mesu Timur dengan pihak SPPBE di Pangkalan Baru, penelitian ini menggunakan Teori Ralf Dahrendorf. Sedangkan yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini adalah dinamika konflik yang terjadi dalam pengembangan kawasan wisata di Pantai Tanjung Tinggi Desa Tanjung Tinggi dengan menggunakan Teori Segitiga Konflik Galtung.

F. Kerangka Teoritis

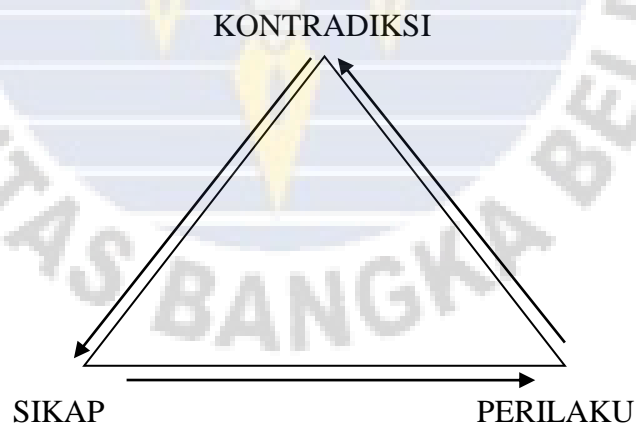
Penelitian ini menggunakan teori Segitiga Konflik Galtung. Teori segitiga konflik Galtung merupakan analisis hubungan sebab akibat atau interaksi yang memungkinkan terciptanya konflik sosial. Ada tiga dimensi dalam konsep segitiga Galtung yaitu sikap, perilaku, dan kontradiksi. Sikap adalah persepsi anggota etnis atau kelompok tentang isu-isu tertentu yang berkaitan dengan kelompok lain. Perilaku dapat berupa kerja sama, persaingan atau paksaan.

Kontradiksi adalah kemunculan situasi yang melibatkan masalah sikap dan perilaku sebagai suatu proses, artinya kontradiksi diciptakan oleh unsur persepsi dan gerak etnis atau kelompok yang hidup dalam lingkungan sosial. Sikap membentuk perilaku, dan pada gilirannya melahirkan kontradiksi atau situasi. Sebaliknya, situasi bisa melahirkan sikap dan perilaku (Robostam dalam Susan, 2009:91).

Galtung menjelaskan adanya 3 kombinasi komponen yaitu *attitude*, sikap yang berupa kebencian, *behavior* adalah sebuah perbuatan yang dapat berupa kekerasan dan *contradiction* dapat berupa pertentangan. Salah satu yang menjadi sumbangan sosiologi konflik Galtung yang memperlihatkan berbagai individu, kelompok, dan organisasi yang membawa kepentingan masing-masing (Susan, 2009:90). Berikut penjelasan konsep segitiga konflik Galtung:

1. Sikap (*attitude*), adalah cara pihak konflik dalam merasakan dan berpikir terhadap konflik yang berkaitan dengan pihak atau kelompok lain. Pandangan dari anggota kelompok terhadap anggota kelompok lainnya yang memicu timbul konflik.
2. Perilaku (*behavior*), adalah ekspresi ketika konflik terjadi baik secara verbal atau fisik. Pandangan dari kelompok terhadap kelompok lain yang dilakukan melalui tindakan nyata.
3. Kontradiksi (*Contradiction*), merupakan pertentangan tajam yang muncul pada konflik atau akar dari munculnya konflik tersebut. Kontradiksi tercipta karena adanya unsur persepsi dan tindakan nyata dari kelompok-kelompok hidup dalam lingkungan sosial.

Gambar 1.1 Konsep Segitiga Konflik Galtung



Konsep segitiga konflik Galtung memetakan tipe-tipe kekerasan secara umum menjadi tiga kategori, yaitu kekerasan yang dilakukan secara langsung *direct violence (behavioral)*, kekerasan dalam budaya (*cultural violence*), dan kekerasan dalam struktur (*structural violence*). Ketiga kategori ini

melambangkan “*the violence triangel*” (segitiga kekerasan). Galtung membagi struktur kekerasan menjadi dua yaitu kekerasan yang dapat dilihat langsung ditandai dengan akibat-akibat yang konkrit seperti pembunuhan dan penghancuran. Kekerasan yang tidak dapat dilihat adalah konflik yang melibatkan aspek kultural dan struktural. Kekerasan kultural menyebabkan kekerasan langsung yang melibatkan aktor kekerasan yang memicu kekerasan struktural dengan menggunakan kultural untuk melegitimasi penggunaan kekerasan sebagai instrumennya.

Galtung (2007) menciptakan tiga dimensi kekerasan yaitu kekerasan struktural, kultural, dan langsung. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Kekerasan Struktural

Menurut Galtung, ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*human needs*) merupakan konsep kekerasan struktural (*structural violence*). Kekerasan ini dapat ditunjukkan dengan rasa tidak aman karena tekanan lembaga-lembaga militer yang dilandasi oleh kebijakan politik otoriter, pengangguran akibat sistem tidak menerima sumber daya manusia dilingkungan, diskriminasi ras atau agama oleh struktur sosial atau politik sampai tidak adanya hak untuk mengakses pendidikan secara bebas dan adil.

2. Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung (*direct violence*) terdapat pada hubungan subjek dan tindakan objek seperti pada seseorang yang melukai orang lain dengan aksi kekerasan. Kekerasan langsung dapat dilihat karena dilakukan secara fisik.

3. Kekerasan Budaya

Kekerasan budaya bisa disebut sebagai motor dari kekerasan struktural dan langsung, karena sifat budaya bisa muncul pada dua tipe kekerasan tersebut. Kekerasan budaya (*cultural violence*) dilihat sebagai sumber lain dari tipe-tipe konflik melalui produksi kebencian, ketakutan, dan kecurigaan (Susan, 2009:118-121).

Kekerasan budaya membuat kekerasan langsung dan kekerasan struktural menjadi terlihat, dirasakan, dan benar atau setidaknya salah. Kekerasan sebagai serangan yang tidak dapat dihindarkan pada kebutuhan dasar manusia, dan lebih umum serangan pada kehidupan yang meningkatkan tingkat kepuasan kebutuhan dibawah apa yang mungkin akan terjadi (Santoso, 2002:184). Berdasarkan kajian awal peneliti di lapangan diketahui bahwa terdapat benturan kepentingan antara pedagang dengan pemilik lahan, sebelumnya terjadi konflik antara pedagang yang sudah lama menetap dengan PT.Ranati selaku pemilik lahan Pantai Tanjung Tinggi. Dari konflik tersebut sudah menemukan solusi dan jalan keluarnya yaitu dilakukan relokasi pedagang ke tempat baru yang sudah dihibahkan oleh PT.Ranati.

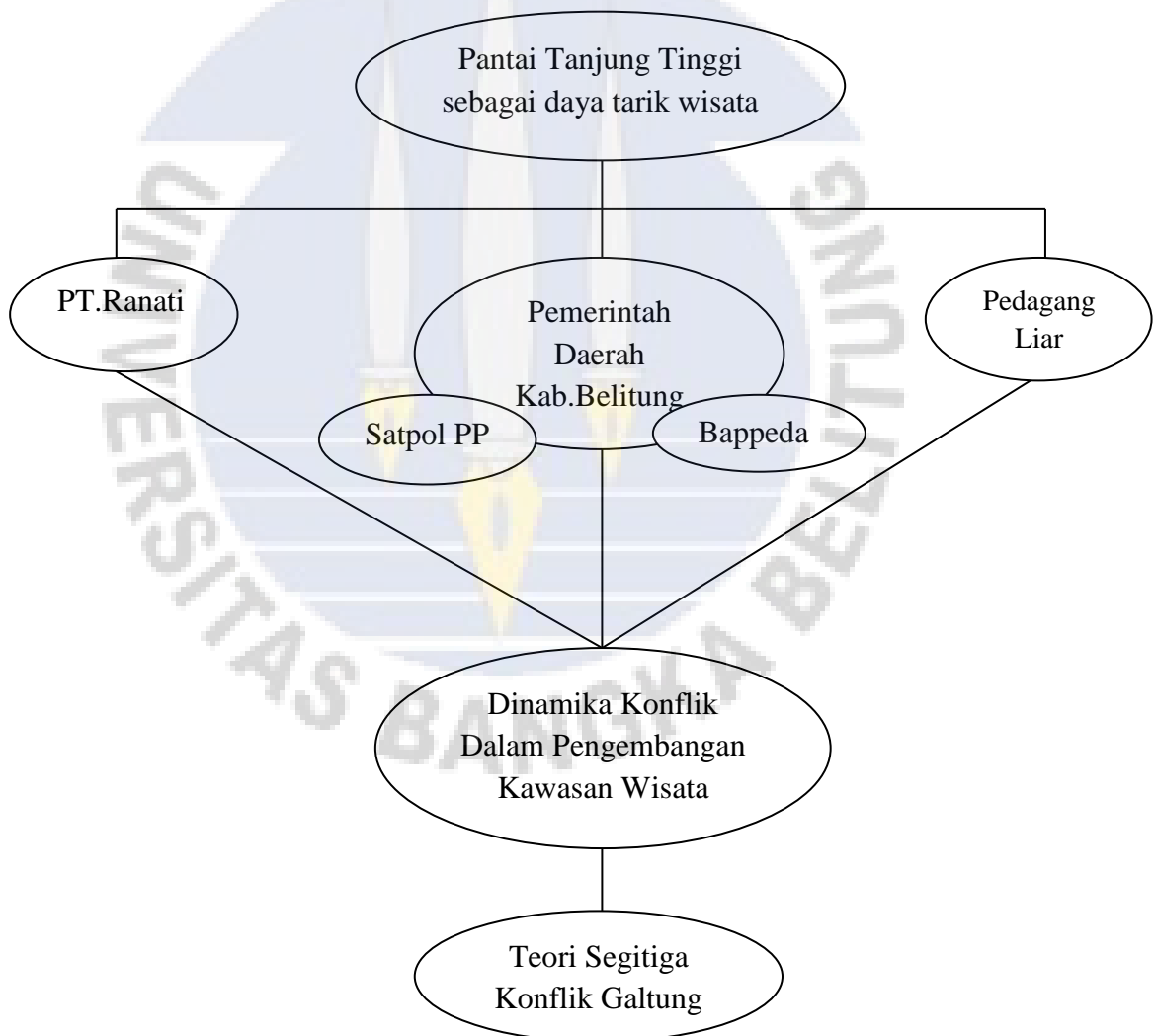
Masuknya pedagang liar ke area Pantai Tanjung Tinggi menghambat gerak pembangunan yang akan dilakukan oleh PT.Ranati, dan walaupun sudah dilakukan penertiban oleh Satpol PP para pedagang kembali berjualan di sekitar pantai. Dalam permasalahan ini aktor yang terlibat adalah PT.Ranati selaku pemilik lahan, pedagang liar yang kembali berjualan dan pihak pemerintah daerah yaitu Satpol PP yang bertugas untuk menertibkan dan mengamankan sekitar pantai tersebut. Peneliti ingin melihat bagaimana sikap yang muncul dari para pedagang yang dilarang oleh pemilik lahan untuk berjualan disekitar area pantai dan penertiban yang dilakukan oleh pihak Satpol PP. Kemudian memunculkan perilaku yang dapat berupa kerjasama atau pertikaian antara pedagang dengan pihak PT.Ranati dan Satpol PP.

Pada akhirnya peneliti ingin melihat kontradiksi yang muncul dari sikap dan perilaku aktor yang terlibat dalam permasalahan tersebut, yang mana dari tiga dimensi konflik menurut Galtung akan memunculkan tiga bentuk kekerasan yaitu kekerasan struktural, kekerasan budaya dan kekerasan langsung yang dilakukan Berdasarkan keterangan diatas maka ada keterkaitan antara sikap, perilaku dan kontradiksi dalam munculnya konflik. Peneliti menggunakan teori segitiga konflik Galtung, karena teori ini dianggap paling relevan dan cocok untuk menganalisis Dinamika Konflik dalam Pengembangan Kawasan Wisata di Pantai Tanjung Tinggi Desa Tanjung Tinggi Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung.

G. Alur Kerangka Pikir

Untuk lebih ringkas peneliti menggunakan kerangka berpikir untuk menunjukkan penelitian yang akan diteliti, dalam menganalisis permasalahan ini peneliti menggunakan Teori Segitiga Konflik Galtung yang akan digambarkan kedalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Skema Alur Pikir



Berdasarkan kerangka pikir yang digambarkan sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis dinamika konflik dalam pengembangan Pantai Tanjung Tinggi sebagai daya tarik wisata Kabupaten Belitung. Pantai Tanjung Tinggi merupakan salah satu daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Belitung, proses pengembangan terdapat pihak yang terlibat yaitu PT.Ranati sebagai pemilik dan pengelola, Pemerintah Daerah yaitu Bappeda dan Satpol PP Kabupaten Belitung sebagai pengawas dan mengontrol jalannya pembangunan, dan pedagang liar.

Upaya untuk mengembangkan Pantai Tanjung Tinggi sebagai daya tarik wisata mengalami hambatan karena terjadi konflik antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Untuk menganalisis konflik tersebut dalam penelitian ini menggunakan Teori Segitiga Konflik Galtung.

H. Sistematika Penulisan

Secara umum, sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri atas lima bab dan rinciannya sebagai berikut:

Dalam Bab I Pendahuluan terdapat beberapa tahap yang akan dijelaskan. Pertama, latar belakang adalah alasan peneliti ingin meneliti masalah atau objek penelitiannya. Sesuai dengan topik yang akan diteliti, maka latar belakang peneliti dalam penelitian ini tentang dinamika konflik dalam pengembangan Pantai Tanjung Tinggi Kabupaten Belitung sebagai daya tarik wisata.

Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang merupakan pertanyaan yang akan diteliti. Lalu, tujuan penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Kemudian, terdapat pula manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. Tahap selanjutnya terdapat tinjauan pustaka yang merupakan literatur penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang diteliti. Tahap selanjutnya yaitu kerangka teoritis dimana tahap ini merupakan alat analisis untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Tahapan terakhir yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dibuat untuk memudahkan peneliti untuk mengurutkan alur pikir penelitian.

Dilanjutkan Bab II yakni, metode penelitian menggunakan jenis dan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini akan diambil di Pantai Tanjung Tinggi Desa Tanjung Tinggi Kecamatan Sijuk dengan objek penelitian tentang dinamika konflik yang terjadi dalam pengembangan Pantai Tanjung Tinggi Kabupaten Belitung sebagai daya tarik wisata. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tak terstruktur sebagai data utama data serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi data.

Bab III mengenai gambaran umum. Dalam gambaran umum, penelitian ini memberikan gambaran berupa data wilayah administrasi dan

demografi Kabupaten Belitung, gambaran umum Kabupate Belitung sebagai Destinasi Wisata dan gambaran Pantai Tanjung Tinggi.

Selanjutnya, Bab IV hasil dan pembahasan menjelaskan atau menganalisis dinamika konflik dalam pengembangan Pantai Tanjung Tinggi Kabupaten Belitung sebagai daya tarik wisata. Kemudian menganalisis permasalahan dengan menggunakan teori.

Bab terakhir yaitu Bab V penutup dibagi atas dua tahap yaitu kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan saran yang berupa rekomendasi- rekomendasi bagi berbagai pihak terkait konflik.

